

**KRONOLOGIS**  
**PENOLAKAN MASYARAKAT PULAU PADANG KECAMATAN MERBAU**  
**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROP. RIAU**  
**TERHADAP**  
**HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) PT. RAPP BLOK PULAU PADANG**  
**(SK NO. 327/MENHUT-II/2009 TANGGAL 12 JUNI 2009)**

---

---

Oleh : SUTARNO,S.Fil.I

**(Koordinator Masyarakat Pulau Padang yang Menolak PT. RAPP)**

PENOLAKAN Masyarakat terhadap HTI di Pulau-pulau lain, di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti (Rangsang dan Tebing Tinggi) dan sekitarnya seperti Semenanjung Kampar, tidak dapat dipisahkan dengan **penolakan Masyarakat Pulau Padang terhadap Operasional PT. RAPP di Pulau Padang**. Penolakan tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Meranti sejak tahun 2009 sebelum Kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten induk Bengkalis.

**a. SEPINTAS PENOLAKAN HTI DI PULAU TEBING TINGGI**

• **Tanggal 7 Mei 2008** (Riauterkini-Pekanbaru)

Sejak sebulan terakhir warga Desa Nipah Sendanu dan Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis Riau dirudung gelisah. Setiap ada kapal berlabuh di dermaga Harapan Baru, yang merupakan gerbang masuk daerah tersebut, puluhan pasang mata siap mengintai gerak-gerik orang asing yang turun dari kapal.

Kemarahan warga memuncak ketika buruh perusahaan PT Lestari Unggul Makmur (LUM) yang menjadi kontraktor pelaksana pembukaan HTI menyebarkan selebaran kertas yang berisi SK Menhut No 217/Menhut-II/2007 Tanggal 31 Mei di Wilayah Desa SungaiTohor.

Dalam SK Menhut tersebut PT Lestari Unggul Makmur diberi izin atas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri (UPHHTI) di Desa Nipah Sendanu, Sungai Tohor, Tanjung Sari, Lukun dan Desa Kepau Baru seluas 10.930 hektare.

Akibat rencana pembukaan HTI yang semena-mena dari perusahaan itu, Forum Komunikasi Kepala Desa se Kecamatan Tebingtinggi menolak keberadaan PT Lestari Unggul Makmur.

Penolakan warga atas rencana pembukaan HTI tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPRD Riau Chaidir. Ia menyesalkan rencana HTI di daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia itu. "Sesuai dengan laporan pengaduan warga, saya rasa ada kesalahan dalam pemberian izin HTI tersebut. Sebab kawasan yang akan dijadikan HTI itu merupakan daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia. Saya setuju bila warga meminta Menhut untuk meninjau kembali izin tersebut, " kata Chaidir.

**b. SEPINTAS PENOLAKAN HTI DI PULAU RANGSANG**

- **Tanggal 22 Juli 2010**, (Riauterkini-Pekanbaru)  
**Hari Kamis** sekitar pukul 17.30 WIB. Dua unit alat berat jenis excavator milik PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dibakar sekelompok warga Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
- **Tanggal 14 Agustus 2010** (Serikat Tani Riau)  
Masyarakat Desa Tanjung Kedabu yang tergabung dengan Serikat Tani Riau sebanyak 600an orang menggelar aksi ke lokasi Areal Konsesi PT. SRL yang sedang melakukan aktifitas Pembabatan Hutan dan memasang patok agar Kegiatan PT. SRL tidak melewati patok yang dibuat masyarakat. Dan sempat terjadi komunikasi antara masyarakat dan humas PT. SRL via telp. Dan perusahaan menyepakati untuk tidak menggarap hutan/lahan yang sudah dipasang patok

#### c. **SEPINTAS PENOLAKAN MASYARAKAT TELUK MERANTI DI SEMENANJUNG KAMPAR**

- **Tanggal 20 Agustus 2009**,  
Masyarakat sekitar kawasan semenanjung Kampar yaitu Teluk Meranti telah membuat surat keputusan yang dengan tegas menolak semua rencana operasional PT. RAPP Ring Kampar, dengan alasan bahwa operasi perusahaan akan menjadi ancaman serius bagi sumber-sumber kehidupan mereka
- **Tanggal 24 Agustus 2010**,  
Masyarakat dan tokoh masyarakat Teluk Meranti serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi protes di Kantor DPRD Pelalawan dan Kantor Bupati Pelalawan, Riau, untuk menolak aktivitas perusahaan yang terus merusak hutan gambut Semenanjung Kampar untuk dijadikan perkebunan HTI dari SK 327 Menhut Tahun 2009 tanggal 12 juni. Mereka juga mendesak pemerintah menerapkan moratorium. Warga tersebut datang ke Ibu Kota Pelalawan, Pangkalan Kerinci menggunakan beberapa unit bus dan mobil bak terbuka. Aksi tersebut digelar setelah warga mengirimkan surat penolakan resmi atas kesepakatan yang dilakukan PT RAPP dengan sejumlah perwakilan masyarakat yang disebut Tim 40. Namun kesepakatan tersebut tidak diterima sebagian masyarakat karena tidak melibatkan mereka dalam penentuan sikap. Sementara surat penolakan warga ditujukan kepada Direktur PT RAPP di Pangkalan Kerinci pada Jumat pekan lalu tersebut dan ditandatangani oleh 429 warga Teluk Meranti. Jasri Abas, yang merupakan salah satu anggota Tim 40 yang menolak kesepakatan dengan perusahaan mengatakan, nota kesepakatan tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan sikap. Dalam butir-butir kesepakatan itu juga dinilai merugikan masyarakat dan menghilangkan hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah dan lahan di kawasan Semenanjung Kampar.
- **Tanggal 7 Oktober 2009**,  
masyarakat Teluk Binjai tanpa aparat desa. Masyarakat juga membuat Surat Pernyataan Penolakan dan mengirimkan langsung ke perusahaan induk yang berkedudukan di Singapura. Warga juga menolak Surat Dukungan dari aparat desa dan tokoh masyarakat Teluk Binjai berkaitan tentang beroperasinya perusahaan di wilayah Semenanjung Kampar karena dinilai tidak mewakili seluruh masyarakat. Aparat Desa ternyata tidak sinkron

dengan warganya dalam memandangi pembukaan hutan untuk penanaman akasia tersebut. Warga lebih melihat kepada kerusakan yang bakal terjadi nantinya atas lingkungan hidup sekitar.

d. **PENOLAKAN MASYARAKAT PULAU PADANG KECAMATAN MERBAU TERHADAP HTI PT. RAPP DI PULAU PADANG**

• **Tanggal 26 Agustus 2009,**

Pj. Bupati Kepulauan Meranti Drs. Syamsuar, M.Si. mengajukan surat kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 100/Tapem/189 tentang Peninjauan ulang terhadap semua IUPHHK-HTI PT. LUM, PT. SRL dan PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti.

• **Tanggal 30 Desember 2009**

MASYARAKAT dari berbagai desa di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya desa-desa dari Pulau Padang antara lain Tanjung Padang, Selat Akar, Kudap, Dedap, Mengkopot, Mengkirau, Bagan Melibur, Pelantai, dan beberapa desa diluar Pulau Padang seperti Semukut, Renak Dungun, Sungai Tohor, dan desa-desa lain yang berjumlah 1000an orang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti (di Selat Panjang) yang saat itu di Jabat Oleh Bupati Pj. Syamsuar, M.Si. masyarakat dan Kepala Desa-kepala desa yang memimpin aksi tersebut dengan tegas menolak rencana operasional PT. RAPP di Pulau Padang. Bupati Syamsuar yang saat itu menjabat, sangat mendukung apa yang dilakukan Masyarakat untuk menolak kehadiran PT. RAPP beroperasi di Pulau Padang.

• **Tanggal 30 Desember 2009** (*Laporan Investigasi Eyes on the Forest*)

Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti (FMPL-KM) mengirim Surat ke Menteri Kehutanan, Perihal Penolakan IUPHHK-HT PT. Sumatera Riau Lestari Blok Pulau Rangsang, PT. LUM dan PT. RAPP blok Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti.

• **Tanggal 10 Februari 2010**

**WARGA PULAU PADANG KE JAKARTA yang PERTAMA**

Perwakilan Masyarakat dan Kepala Desa Pulau Padang yang berjumlah 9 orang dan beberapa organisasi/LSM seperti Meranti Center, Walhi, Mahasiswa Bengkalis, masyarakat Padang Lawas mendatangi Kantor Kementerian Kehutanan di Jakarta menuntut tinjau ulang SK Menhut No. 327 tahun 2009 sekaligus menuntut pencabutan izin HTI di Kepulauan Meranti. Setelah masyarakat mendatangi Kantor Kementerian Kehutanan kemudian Masyarakat Pulau Padang mendatangi Kantor PT. RAPP di Jakarta menuntut hal yang sama.

• **Tanggal 12 Februari 2010**

Perwakilan Masyarakat dan Kepala Desa Pulau Padang yang berjumlah 9 orang dan beberapa organisasi/LSM al. Meranti Center, Walhi, Mahasiswa Bengkalis, masyarakat Padang Lawas mendatangi dan menemui DPD-RI wilayah Riau Instiawati Ayus di Gedung DPR-RI dan Anggota DPR-RI Komisi IV di Jakarta menuntut tinjau ulang SK Menhut No.

327 tahun 2009 sekaligus menuntut pencabutan izin HTI di Kepulauan Meranti. (Sumber: wawancara dengan Toha Kepala Desa Mengkirau di Mengkirau, tanggal 12 Juli 2011)

- **Tanggal 6 Maret 2010**

11 orang perwakilan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk yang kedua kalinya ke Jakarta mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri sekaligus menuntut pencabutan SK Menhut No. 327 tahun 2009. (wawancara dengan Toha Kepala Desa Mengkirau di Mengkirau, tanggal 12 Juli 2011)

- **Tanggal 26 Juli 2010,**

Masyarakat Kec. Merbau sebanyak 350an orang mendatangi Kantor DPRD Kepulauan Meranti dan menuntut penghentian operasional dan Pencabutan izin HTI di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti PT. SRL dan PT. LUM dan PT. RAPP

Dialog antara perwakilan masyarakat dan anggota-anggota DPRD yang juga hadir ketua DPRD Hafizoh, wakil ket. DPRD Taufikurrahman dan puluhan anggota DPRD lainnya. Dalam kesempatan tersebut terjadi perdebatan antara masyarakat dan anggota dewan. Dalam menanggapi aspirasi dan tuntutan masyarakat, Ketua DPRD Kab. Kepulauan Meranti Hafizoh menyatakan *"jika bapak-bapak seratus persen menolak HTI di Kepulauan Meranti, saya juga menolak bahkan seratus limapuluh persen. Akan tetapi kami tidak memiliki wewenang untuk menghentikan operasional HTI di Kabupaten kepulauan Meranti, yang memiliki wewenang ini adalah bapak Bupati"*.

Dalam dialog tersebut DPRD juga berjanji akan turun meninjau kelapangan.

- **Tanggal 30 Juli 2010,**

DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan RI Nomor 661/DPRD/VII/2010 tentang Permohonan Peninjauan ulang izin operasional PT. SRL, PT. LUM, dan PT. RAPP (terlampir)

- **Tanggal 19 Agustus 2010** (10 Ramadhan)

Masyarakat Pulau Padang dan Masyarakat Pulau Rangsang sebanyak 700 orang lebih, mendatangi Kantor DPRD Kepulauan Meranti masih dengan tuntutan yang sama menuntut pencabutan izin PT. RAPP di Pulau Padang dan menuntut penghentian operasional PT. SRL dan PT. LUM.

- **Tanggal 3 September 2010,**

Bupati Kepulauan Meranti mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta nomor 100/TAPEM/IX/2010/70 perihal Peninjauan Ulang IUPHHK-HTI PT. LUM, PT. SRL dan PT. RAPP terkait dengan penolakan HTI yang dilakukan oleh masyarakat.

- **Tanggal 8 September 2010**

Gubernur Riau mengeluarkan Surat No. 223/IX/2010 tanggal 8 September 2010, tentang izin Pembuatan Koredor pada IUPHHK-HT, PT. RAPP Pulau Padang di Kabupaten kepulauan Meranti.

Setelah sekian hari sejak tanggal dikeluarkan Surat Gubernur tentang izin koredor tersebut, wargapun kemudian mengetahuinya. Surat tersebut memunculkan keresahan

bagi warga pulau padang dan memancing amarah masyarakat, yang seharusnya setelah hari raya idul Fitri masyarakat memfokuskan untuk berkebudaya memperbaiki perekonomian setelah berkunjung ke sanak saudara pada hari raya. Lagi-lagi masyarakat di "paksa" untuk mendatangi kantor Bupati di selatpanjang. Dan masyarakat semakin marah ketika 2 orang buruh warga Pulau Rangsang yang mengolah kayu dijadikan Papan/bahan kapal ditangkap oleh pihak keamanan. Padahal mereka memiliki surat kelompok Tani yang legal.

- **Tanggal 11 Oktober 2010,**

Merespon surat Gubernur tentang izin pembuatan Koredor, Masyarakat Pulau Padang dan Rangsang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti antara lain menuntut pembebasan 2 orang wagra petani Rangsang yang di tangkap oleh pihak keamanan AIRUT karena menjual kayu hasil olahan ke Selatpanjang, dan menuntut penghentian Operasional PT. SRL, dan pencabutan izin PT. RAPP di pulau padang.

Dalam aksi ini masyarakat diterima oleh wakil Bupati untuk berdialog dengan beberapa wakil masyarakat terkait penolakan masyarakat terhadap operasional Perusahaan-perusahaan Pembabat Hutan Alam di kabupaten Kepulauan Meranti. Judul dalam Pernyataan sikap Aksi tersebut adalah;

**"Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti HARUS MAMPU Mengusir keberadaan PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti...!"**

Kutipan pernyataan Sikap aksi masyarakat tanggal 11 Oktober 2010: *"Penangkapan terhadap 2 (dua) masyarakat Desa Bungur Kecamatan Rangsang yang merupakan rekan seperjuangan kita atas Nama Agus alias Sanum dan Ruslan alias Jun Oleh AIRUT Tanjung Samak dengan Petugas Bernama Jefri, Ardian Syah, dan Saudara Iwan Dengan No Kapal: 004 Pada hari Selasa Tanggal 28 September 2010 pada Pukul 5.30 WIB di Perairan Kelautan Selatpanjang dengan Tuduhan Illegal logging atau membawa kayu dengan dokumen tidak lengkap tersebut adalah merupakan Tindakan Yang sangat Merugikan Bagi Kehidupan Buruh Tani yang pada akhirnya penangkapan terhadap Rekan kita tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kebijakan Politik Pemerintah saat Ini lagi-lagi hanya menguntungkan Pemilik Modal Asing di Negeri Ini. Karna jelas terbukti keberadaan PT.SRL, PT. LUM dan PT. RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti yang jelas-jelas keberadaan mereka sangat di tentang oleh rakyat, Mamun pada kenyataanya kebijakan Politik Pemerintah di tingkatan Bupati dan Dewan dalam merespon aksi kita dengan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi tidaklah membawa capaian besar untuk menguntungkan perjuangan Rakyat. Terbukti hingga saat ini Oprasional mereka tidak pernah Berhenti dan Bahkan dengan Leluasa Mengeluarkan Puluhan Ribu Ton Kayu dari Kabupaten kepulauan ini dan Tidak mendapat suatu apapun."*

Massa denganjumlah 1500 orang lebih dalam pernyataannya sebagai berikut:

1. Mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk SEGERA mengeluarkan surat penolakan terhadap SK Gubernur Riau Nomor : KPTS/1223/IX/2010 tanggal 08 September 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. RAPP Pulau Padang (Desa Sungai Hiu Tanjung Padang) Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bebaskan kawan kami Agus alias Sanum dan Ruslan alias Jun sekarang Juga !!!

3. *Usut dan Tangkap Mafia Tanah dengan Modus Kelompok tani yang telah disahkan oleh kepala desa setempat di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Rangsang.*
4. *Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti harus menegaskan sikap politiknya terhadap pemerintahan Pusat maupun Propinsi atas surat yang pernah di keluarkan, agar di lakukan peninjauan ulang SK menhut tersebut demi kepentingan rakyat atau Mundur Sekarang Juga !!!*

- **Tanggal 29 Oktober 2010,**

Perwakilan Masyarakat Pulau Padang berdasarkan undangan pihak perusahaan, bertemu dengan manajemen PT. RAPP di Hotel Gran Zuhri Pekanbaru. Dalam pertemuan tersebut masyarakat menuntut Pihak perusahaan sebelum beroperasi di Pulau Padang untuk melakukan *Mapping* (pemetaan ulang), *inclaving*, dan pembuatan tapal batas permanen sebelum PT. RAPP melakukan operasional di Pulau Padang.

Secara lisan pihak perusahaan menyetujui semua tuntutan masyarakat Pulau Padang yang saat itu diwakili oleh 10 orang petani Pulau Padang yang didampingi oleh Teri Hedra Caniago Ketum KPP-STR Propinsi Riau dan Dessri Kurniawati, SH Sekjen KPP-STR Prop Riau. namun secara tertulis berbeda dengan apa yang disepakati secara lisan. Sehingga pihak masyarakat tidak mau menandatangani berita acara dan notulensi hasil pertemuan.

- **Tanggal 30 Oktober 2010**

PT. RAPP menggelar sosialisasi dengan mengundang masyarakat Pulau Padang, perwakilan petani, LSM, Mahasiswa, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Herman, Aziz, Fauzi Hasan, Asmawi, pejabat sekretariat DPRD Kep. Meranti Burhanuddin yang sebelumnya adalah pejabat dinas Kehutanan kepulauan Meranti yang telah mengesahkan dan membuat berita acara survey lokasi jalan koredor (tanggal 17 Mei 2010) dan rekomendasi untuk pembuatan jalan Koredor di Sungai Hiu Pulau Padang. Diundang juga orang-orang yang dianggap tokoh masyarakat oleh pihak perusahaan. Dalam acara tersebut Salah satu perwakilan masyarakat meminta pihak perusahaan untuk menunjukkan AMDAL sebagai syarat untuk dikeluarkannya SK Menhut. Namun pihak perusahaan menjawab bahwa AMDAL adalah domainnya Pemerintah.

- **Tanggal 3 November 2010**

Direktorat Jenderal Bina Usaha kehutanan tertanda Direktur jenderal Imam Santoso, No. S.1055/VI-BPHT/2010 tanggal 3 November 2010 perihal: Mohon ditinjau ulang Izin Operasional PT. SRL, PT. LUM dan PT. RAPP yang ditujukan kepada ketua DPRD Kabupaten kepulauan Meranti.

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa IUPHHK-HTI ketiga perusahaan tersebut adalah sah dan aktif yang memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman Industri dan Rencana kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu pada Hutan tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun berjalan. Dan seluruh areal Kerka IUPHHK-HTI tersebut berada dalam kawasan Hutan produksi.

- **Tanggal 26 November 2010**

*Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XI/2010/96 perihal; Rekomendasi*

Pada hakekatnya bias di pahami bahwa surat tersebut adalah sebuah perintah kepada camat untuk memfasilitasi pihak perusahaan PT. RAPP yang akan menjalankan operasionalnya di Pulau Padang

- **Tanggal 29 November 2010,**

Perwakilan Masyarakat Pulau Padang bertemu lagi dengan Pihak Manajemen PT. RAPP untuk membicarakan rencana Masyarakat Pulau Padang akan membuat kegiatan SEMINAR TERBUKA dan akan dijadikan wadah untuk mempertemukan semua unsure pemerintahan baik Bupati, Dishut, DPRD, Camat, Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan masyarakat umum dan pihak Perusahaan PT. RAPP dalam acara SEMINAR TERBUKA tersebut. Dalam pertemuan untuk yang kedua kalinya dengan PT. RAPP di hotel Gren Zuhri Pekanbaru, pihak perusahaan di samping tidak mengakui kesepakatan dan kesanggupan pada pertemuan tanggal 29 Oktober 2010 justru juga malah menyampaikan bahwa pihak perusahaan akan segera beroperasi di Pulau Padang.

- **Tanggal 10 Desember 2010**

*Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XII/2010/97, perihal; Sosialisasi*

- **Tanggal 13 Desember 2010,**

Masyarakat Pulau Padang Kec. Merbau dari berbagai desa antara lain warga Desa Lukit, Meranti Bunting, Pelantai, Mekar sari, Kelurahan Teluk Belitung, Bagan Melibur, Mengkirau dan desa-desa lain, lebih kurun 1300an orang lebih melaksanakan Do'a Bersama (ISTIGHOTSAH) di Masjid Raya Teluk Belitung, ibukota Kec. Merbau, dengan harapan Rencana Operasional PT. RAPP yang diyakini sebagai musibah dan malapetaka besar karena bakal menghabiskan lahan dan perkebunan warga dan hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Istighotsah di pimpin oleh KH. Mas'ud (Mekarsari), K.H. AHMADI (Mengkirau), Ustad Sudarman (Sungai anak kamal), Ustad Yakup, Kepala Desa dan anggota DPRD Kab. Kep. Meranti. H.Muhammad Adil, SH. Juga hadir dalam acara istighotsah tersebut dan bahkan memberikan sambutan.

- **Tanggal 15 Desember 2010,**

Masyarakat membuat kegiatan SEMINAR TERBUKA di hadiri oleh 2500 orang masyarakat Pulau Padang dan Pulau Rangsang dengan tema "**Dampak HTI terhadap Lingkungan dan kehidupan Masyarakat**", dengan mengundang seluruh pejabat dari Bupati sampai LPMMD dan pihak Perusahaan PT. RAPP (Bupati dan wakil Bupati, DPRD, Camat, Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Pimpinan-pimpinan Parpol di Kep. Meranti). Masyarakat sangat menyesalkan bahwa bahwa pihak perusahaan tidak ada satupun yang hadir termasuk Bupati sendiri.

Pendanaan Seminar Terbuka ini dilaksanakan dengan swadaya masyarakat ditambah luran masyarakat Pulau Padang 20.000/orang (anggota STR).

Masyarakat sangat menyayangkan pihak Pemda BUPATI, Wakil Bupati, dan pejabat-pejabat terkait tidak hadir termasuk Manajemen PT. RAPP.

Sedang yang hadir dalam SEMINAR TERBUKA tersebut HANYA Wakil Ketua DPRD Taufikurrhman, Basiran, Edi AMin, Ketua DPC PKS. Camat Merbau, Kapolsek Merbau,

Danramil Merbau, beberapa Kepala Desa di wilayah Pulau Padang, BPD, tokoh Masyarakat, dan Tokoh-tokoh Agama.

Sebagai Pemateri antara lain; Sekjen STN Wiwik Widjanarko, dan Direktur Tansparansi Indonesia (TI) Rafles, S.Sos.

in-put dari SEMINAR TERBUKA tersebut adalah bahwa; 1). areal konsesi PT. RAPP di Blok Pulau Padang berada pada areal yang tumpang tindih dengan lahan/kebun warga. 2). Dengan dibukanya kanal-kanal akan menyebabkan intrusi air masin ke darat dan pengeringan lahan yang cukup signifikan pada musim kemarau yang akan menyebabkan mudah terbakar. 3). Dari sisi perijinan, di ketahui bahwa Rekomendasi oleh pejabat bengkalis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dikeluarkannya SK Menhut 327 2009, sama sekali tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.

- **Tanggal 20 Desember 2010,**

Camat Merbau melayangkan surat kepada kepala Desa Tanjung Padang, nomor: 100/tapem/2010/451, perihal sosialisasi (perusahaan PT. RAPP di Tanjung Padang), yang isinya antara lain adalah agar kepala desa Tanjung Padang memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan oleh pihak Perusahaan. Cukup lama tidak diketahui oleh masyarakat bahwa Dirjen Kementerian Kehutanan sudah membalas surat yang diajukan oleh DPRD Kabupaten kepulauan Meranti menyatakan bahwa izin ketiga Perusahaan di Kep. Meranti dinyatakan sah dan aktif. Sehingga Bupati Kepulauan Meranti secara diam-diam dua kali mengirimkan surat kepada camat Merbau

- **Tanggal 3 Januari 2011,**

Masyarakat cukup menunjukkan sikap amarah yang luar biasa dan mendatangi Kantor Camat Merbau sebanyak 1500 orang dan menuntut camat untuk mencabut surat yang dikirim ke kepala desa Tanjung Padang dan menggagalkan rencana Sosialisasi PT. RAPP di Tanjung Padang yang berujung kepada memasukkan alat berat Ke Pulau Padang. Masyarakat juga menuntut Pemerintah RI untuk mencabut Izin Operasional PT RAPP di Pulau Padang.

Sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya, Massa membakar tiga gambar yang pada bagian kepala ditempel wajah gambar Camat Merbau Duriat, gambar Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir dan Gambar Gubernur Riau Rusli Zainal.

Selain itu, massa juga mengusung Keranda Mayat dan ayam putih yang keduanya di hadiahkan kepada camat Merbau.

- **Tanggal 4 Januari 2011,**

Malam hari setelah solat Isya' dan setelah aksi di kantor camat Merbau pada pagi harinya, Masyarakat dari berbagai Desa sebanyak 313 orang antara lain dari desa Lukit, Meranti Bunting, Pelantai, Mekarsari, Kelurahan Teluk Belitung, Mengkirau dan puluhan warga Tanjung Padang dengan 4 kapal pompong, memblokir acara sosialisasi PT RAPP di Dusun Suka Jadi desa Tg. Padang dan menggagalkan Sosialisasi PT. RAPP yang terbukti sesuai pengakuan masyarakat Tanjung Padang bahwa sosialisasi tersebut adalah tahapan akan memasukan alat berat ke Pulau Padang pada tgl 6 Januari 2011.

Saat-saat menegangkan terjadi ketika pihak kepolisian dan perusahaan datang, baru saja duduk beberapa detik di kursi-kursi yang tersedia rapi disertai oleh panitia, ratusan masyarakat keluar dari semak belukar berbaris rapi dengan satu komando "sepuluh langkah maju jalan....." disertai Takbir "ALLAHU AKBAR...!!!!. ALLAHU AKBAR.....!!!! dan Yel-yel "R A P P....." "perampas Tanah Rakyat....Usir....Usir....Usir", Kapolsek Merbau pun tidak lengah ibarat orang yang sedang termenung tersengat api bergegas lari menghampiri warga, khawatir masyarakat melakukan hal-hal yang anarkis.

Sosialisasi PT. RAPP yang direncanakan cukup meriahkan disertai hiburan orgen tunggal, setelah dilakukan dialog yang cukup menegangkan antara pihak masyarakat dan kepolisian (kapolsek Merbau) dan pihak PT. RAPP, akhirnya mendapat kata putusan dengan pertimbangan jika sosialisasi dilanjutkan dapat dipastikan akan terjadi pertempuran antara pihak masyarakat dan pihak perusahaan. Akhirnya kemudian diumumkan oleh panitia secara resmi bahwa sosialisasi PT. RAPP di Sukajadi dibatalkan.

Meski demikian masyarakat pun belum merasa puas dan tidak akan beranjak dari lapangan bola yang di jadikan tempat sosialisasi, sebelum tenda dan bangsal di bongkar dan di angkut keluar dari lokasi.

- **Tanggal 20 Januari 2011,**

Masyarakat Pulau Padang sekitar 1000 orang lebih yang berangkat pada malam hari dengan 7 kapal pompong memblokir akan masuknya alat berat di dusun sg. Hiu Desa Tanjung Padang.

- **Tanggal 1-2 februari 2011,**

Masyarakat Pulau Padang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti bahkan menginap di depan Kantor Bupati sebanyak 3000an orang. Dengan menggunakan 14 kapal pompong berangkat dari rumah masing-masing ada yang jam 04.00 subuh dan ada yang setelah maghrib seperti desa Tanjung Padang. Masyarakat Menuntut Pencabutan Izin PT. RAPP, SK No. 327 Menhut 2009, dan menyerahkan Petisi Penolakan Masyarakat terhadap Rencana Operasional PT. RAPP di Pulau Padang PT. SRL di Rangsang dan PT. LUM di Tebing Tinggi kepada Pemerintah Kabupaten yang di terima oleh asisten I Setdakab Kepulauan Meranti Drs. Ikhwani.

- **Tanggal 11 Februari 2011, Kamis**

Merespon aksi massa tanggal 1 dan 2 Februari 2011 di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Komisi B DPRD Propinsi Riau, yang diwakili oleh wakil komisi B Zulfan Heri, Sumiyati, dan Mahdinur melakukan kunjungan dinas untuk bertemu masyarakat di pulau padang (usai solat jum'at) yang menolak akan beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang dan akan melihat langsung lokasi kegiatan operasional PT. SRL di Pulau Rangsang. Dialog langsung antara anggota Komisi B DPRD Propinsi dengan masyarakat pulau Padang dilaksanakan di aula kantor camat Merbau yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat Pemkab Kep. Meranti. Zulfan Heri dalam penyampaiannya berjanji bahwa DPRD Propinsi Riau akan membentuk Pansus HTI Riau secepat-cepatnya, agar pansus tersebut dapat mengakaji secara obyektif tentang dampak negative dan positif yang bakal ditimbulkan oleh operasional PT. RAPP di Pulau padang dan secara umum di Propinsi Riau. Sementara Kadishutbun Kab. Kep.

Meranti Makmun Murad menyampaikan bahwa izin PT. RAPP di pulau padang adalah wewenang Menhut.

- **Tanggal 22 Februari-14 April 2011**

- **AKSI DUA BULAN WARGA P. PADANG & MAHASISWA DI DPRD PROP. RIAU**

Hampir 2 bulan penuh Mahasiswa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat Meranti (PPRM), Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPEL) dari berbagai Kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas yang ada di Pekanbaru dan beberapa perwakilan masyarakat Kepulauan Meranti Pulau Padang, mendirikan Tenda dan Posko di depan Kantor DPRD Propinsi Riau menuntut DPRD Prop. Untuk segera mengesahkan PANSUS HTI Riau.

Disekitar Posko juga dipasang berbagai Spanduk dengan ukuran besar yang bertuliskan berbagai tuntutan, seperti: "Cabut SK Menteri Kehutanan Nomor 327/Menhut-II/2009", "Usir RAPP dari Pulau Padang" "jangan Politisasi Pansus HTI". BEM UNRI menulis; "Selamatkan Rakyat Meranti dari Kediktatoran RAPP dan Pemerintah". "Hentikan Penyerobotan Tanah di Propinsi Riau", Dewan Penghianat Rakyat Daerah Propinsi Riau" dan masih banyak lagi spanduk-spanduk lain yang pada intinya menolak Operasional Perusahaan bubur Kertas di Kepulauan Meranti.

Posko yang digelar selama hamper dua bulan mereka juga beberapa kali menggelar aksi Massa menuntut DPRD Prop untuk segera mengesahkan Pansus HTI Riau yang juga hadir masyarakat petani pulau Padang, hingga pemblokiran mobil anggota DPRD Prop. Agar tidak keluar dari areal Kantor DPRD dan mencederai mahasiswa, seperti yang terjadi pada sidang paripurna Pembentukan Pansus HTI Riau tanggal 5 April 2011 yang gagal.

- **23 Februari 2011,**

- **PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI KELAYAKAN OPERASIONAL PT.RAPP DI P. PADANG BERUBAH MENJADI TIM PENGAWAS OPERASIONAL**

Pertemuan Multipihak di Aula RSUD Selatpanjang, dalam rangka "MENCARI SOLUSI ADIL DAN DAMAI KONFLIK MASYARAKAT DAN PT. RAPP" terkait penolakan Masyarakat terhadap HTI di Kepulauan Meranti, hadir Bupati Kepulauan Meranti, DPRD, Camat se Kabupaten Kep. Meranti, Kepala Desa Se Pulau Padang, Tokoh Agama (MUI) LSM seperti JMGR, Scael Up, Walhi, termasuk 69 perwakilan petani Pulau Padang.

Dalam sambutan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir secara tegas mengatakan terkait maraknya aksi massa yang menolak keberadaan HTI di Kepulauan Meranti "*mari kita bentuk Tim yang akan mengkaji secara obyektif, jika memang izin HTI di Kepulauan Meranti berdampak positif sama-sama kita terima, akan tetapi jika HTI berdampak Negatif sama-sama kita tolak*".

Setelah Bupati meninggalkan Aula RSUD, ruang pertemuan multipihak tersebut. Rapat dipimpin langsung oleh Makmun Murad dan beliau mengerucutkan pada perwakilan-perwakilan Tim yang dimasukkan kedalam TIM. Pada saat itu disepakati yang masuk kedalam TIM adalah Kadishutbun Kep. Meranti (Makmun Murad), semua Kepala Desa yang hadir yang berasal dari Pulau padang, Pakar/Tim ahli, 10 orang Wakil Masyarakat Petani dari Pulau Padang, dari LSM/NGO adalah Walhi, Scael Up, dan JMGR. Tugas Tim adalah Mengkaji kelayakan Operasional PT. RAPP di Blok Pulau padang. Hasil kajian inilah yang kemudian akan dijadikan acuan atau rekomendasi, jika memang hasil kajian Tim

menyatakan bahwa rencana Operasional PT. RAPP berdampak positif dari berbagai sisi silakan dilanjutkan, akan tetapi jika hasil kajian Tim berdampak buruk akan sama-sama ditolak.

- **Tanggal 16 Maret 2011,**

Dalam rapat (di Kantor Dishutbun Kep. Meranti) tersebut hadir Asisten I setdakab. Ikhwani, Ketua Komis I DPRD Kep. Meranti Herman, Ketua Komisi II Rubi Handoko, Makmun Murad (kadishutbun), Pihak PT. RAPP, LSM/NGO, Kepala desa se Pulau Padang dan 8 orang wakil Petani Pulau Padang.

Dalam pertemuan sempat terjadi ketegangan. Hal ini disebabkan oleh sikap kadishutbun Makmun Murad yang mengarahkan Tim, sebagai Tim Pengawas operasional.

Pembentukan TIM Pengkaji sebagaimana ditetapkan pada tgl 23 Februari 2011 di Aula RSUD Selatpanjang tentang "Tim Pengkaji Kelayakan" di Rubah serta merta menjadi "TIM Pengawas Operasional PT. RAPP di Pulau Padang".

Rapat sama sekali tidak mengakomodir aspirasi yang berkembang dan melenceng dari kesepakatan tanggal 23 februari 2011.

- **Tanggal 27 Maret 2011,**

**PT. RAPP mulai beroperasi di PULAU PADANG**

PT RAPP memasukkan ALAT BERAT ke Pulau Padang Sungai Hiu Desa Tanjung Padang, pada dini hari jam 01.00 wib, mendengar informasi alat berat PT. RAPP TEPATNYA DI SUNGAI HIU DESA TANJUNG PADANG, (di ujung utara pulau Padang), sontak saja masyarakat Tanjung Padang bergegas memberitahukan yang lain bahkan masyarakat yang tinggal diujung selatan pulau padang seperti Lukit, Meranti Bunting, Pelantai, Mekar sari, Mengkirau, Kelurahan Teluk Belitung.

Tidak lengah dari berbagai penjuru desa mulai dari jam 03.00 wib (dini hari) suasana kampung-kampung di Pulau Padang hiruk-pikuk, Sama-sama berduyun-duyun menuju ke Tg. Padang dengan menggunakan sepeda motor meskipun harus melewati jalan tanah gambut yang cukup becek karena belum semuanya di semenisasi.

Sekitar 500 orang menghadang di lokasi naiknya alat berat lebih kurang jam 11.00-12.00 siang. Sedangkan 34 warga tanjung padang sudah sampai dilokasi dan menghadang alat berat dengan menaiki pompon jam 3.30 wib (dini hari) Di pantai hutan bakau dusun sg. Hiu desa Tanjung Padang. Sehari penuh sampai menjelang maghrib masyarakat tidak beranjak dari bibir pantai tempat 2 unit alat berat akan di turunkan

Menjelang maghrib malam Senin tanggal 27 Maret 2011 terjadi perdebatan antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan setengah mengancam bahwa masyarakat tidak berhak menghadang alat berat PT. RAPP dengan alasan bahwa hutan bakau tempat naiknya alat berat sudah diganti rugi oleh pihak perusahaan. Mendengar ancaman pidana dari pihak kepolisian akhirnya masyarakat meninggalkan lokasi. Dan keesokan harinya.....

- **Tanggal 28 Maret 2011,**

**"AKSI STEMPEL DARAH dan TAHLIL di DEPAN KANTOR BUPATI",**

Masyarakat sekitar 1000 lebih warga Pulau Padang, Mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti dan melakukan AKSI STEMPEL DARAH. Sebagai wujud perlawanan masyarakat terhadap masuknya alat Berat PT. RAPP di Pulau Padang, dan Bahwa Penolakan Masyarakat terhadap operasional PT. RAPP di Pulau Padang adalah harga Mati. Masyarakat siap mempertahankan setiap jengkal tanah di Pulau Padang. Tahlil sholawat dan takbir tidak henti-hentinya demikian haru mengirinya masyarakat yang menitiskan setetes Darahnya ke kain putih yang di pajang di Pagar Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang, sebagai symbol ketidakrelaan masyarakat yang akan terus memperjuangkan pulau Padang dari kehancuran Pembabatan Hutan secara besar-besaran.

DALAM PADA ITU, sekitar 15 orang perwakilan masyarakat diterima oleh wakil bupati untuk melakukan dialog terkait tuntutan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut hadir hamper semua pejabat tinggi tinggi di kabupaten kepulauan meranti termasuk juga Kadishutbun Kep. Meranti Ir. Makmun Murad, Asisten I Setdakab. Drs. Ikhwani. Jawaban Wakil Bupati Masrul Kasmi dan Makmun Murad adalah kami tidak punya wewenang untuk menghentikan/menarik mundur 2 unit eskavator yang masuk ke pulau Padang. Dan SK Menhut adalah wewenang Menteri Kehutanan untuk mencabutnya.

Sedangkan Makmun Murad dalam menanggapi aspirasi dan pengaduan masyarakat, justru malah mengarahkan supaya masyarakat menggugat PT. RAPP melalui jalur hukum ke pengadilan.

- **Tanggal 14 April 2011**

Sesuai informasi dari Lokasi Operasional PT. RAPP di Sungai Hiu desa Tanjung Padang kecamatan Merbau (Pulau Padang), 8 unit eskavator mulai meluluhlantakkan hutan bakau dan hutan alam yang ada di pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Keberadaan 8 unit Escavator tersebut sangat memicu amarah warga dan sangat rentan terhadap konflik dan bentrok fisik antara penduduk dan pekerja lapangan PT. RAPP

- **Tanggal 14 April 2011**

**WARGA PULAU PADANG KE JAKARTA YANG KE II**

46 perwakilan masyarakat Pulau Padang, berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi jahit mulut, meskipun setelah selama di sana satu bulan terpaksa harus diurungkan.

- **Kamis, Tanggal 21 April 2011,**

Petani Pulau Padang berjumlah 46 orang di damping STN dan STR Mendatangi Kementerian Kehutanan dan di sana bertemu dengan Hadi Daryanto (Setjen Kemenhut RI), Imam santoso (Ditjen Kemenhut), Bedjo Santoso (Dir. Bina Pengembangan Hutan Tanaman), Kabiro Hukum Kemenhut, Staf Ahli Kemenhut, Ali Tahir dan beberapa pejabat Kemenhut lainnya. Ketika masyarakat mendesak untuk menghentikan dan menarik mundur excavator yang sedang melakukan operasional, pihak Kementerian Kehutanan berkilah akan mendengar dulu penjelasan dari pemerintah daerah.

Dirjen kehutanan Berjanji hari senin tanggal 25 April 2011, akan mengeluarkan surat pemanggilan Bupati Kepulauan Meranti ke Jakarta, untuk membahas penolakan masyarakat Pulau Padang terhadap operasional PT. RAPP di Pulau Padang yang dipaksakan.

- **Senin, tanggal 25 April 2011**

Jam 09.00 pagi 46 orang Petani Pulau Padang, melakukan aksi Mogok Makan Massal di pintu masuk **KEMENHUT DAN MENDIRIKAN TENDA**. Lebih kurang pada tengahhari Kemenhut mengeluarkan surat pemanggilan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir untuk datang ke Jakarta pada tanggal 28 April 2011.

Tekad Petani Pulau Padang akan melakukan aksi hingga Menteri Kehutanan benar-benar memberikan jawaban atas tuntutan petani dan mencabut SK Menhut No. 327 tahun 2009 yang memberikan izin pada PT. RAPP di Pulau Padang serta menunggu Bupati hadir ke Jakarta, namun tepat jam 19.00 para petani dibubarkan oleh aparat kepolisian dengan alasan melanggar batas waktu unjuk rasa.

- **Selasa, 26 April 2011**

Para Petani Pulau Padang Masih dengan kondisi Mogok Makan dengan menggunakan 2 buah Bus, membuat pengaduan **KE KOMNAS HAM** terkait operasional PT. RAPP di Pulau Padang. Pengaduan para Petani diterima langsung oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Johnny Nelson Simanjuntak.

Inti pengaduan menyangkut tiga hal, pertama bahwa SK Menhut No. 327 tahun 2009 telah meresahkan masyarakat Pulau Padang, karena warga pulau padang akan kehilangan hak hidup dan sumber-sumber kehidupan juga berpotensi mengadu-domba warga, kedua, dengan masuk dan beropersinya eskavator PT. RAPP ke pulau Padang sejak tanggal 27 Maret 2011 adalah bentuk provokasi terhadap warga. Dan ketiga meminta izin kepada Komnas HAM untuk memberikan tempat bagi para petani untuk melanjutkan AKSI MOGOK MAKAN.

Ketiga tuntutan tersebut pihak KOMNAS HAM memenuhi semua tuntutan petani dengan jalan akan segera menyurati Pihak Menhut atas potensi terjadinya pelanggaran HAM atas turunnya SK Menhut No. 327 tahun 2009 dan memberikan ruang kepada para petani Pulau Padang untuk melanjutkan aksi mogok makan.

Usai pertemuan tersebut petani mendirikan tenda di luar gedung Komnas HAM dan melanjutkan aksi mogok makan dengan memasang spanduk-spanduk ukuran besar yang berisikan Peta Pulau Padang dan areal konsesi PT. RAPP di blok Pulau Padang seluas 41.205 ha bertuliskan 1. Hentikan operasional PT. RAPP di Pulau Padang dan 2. Cabut SK Menhut No. 327 tahun 2009.

- **Rabu, tanggal 27 April 2011**

Para petani mandatkan **KANTOR KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI(KPK)** untuk melaporkan dugaan adanya korupsi dalam proses dikeluarkannya SK Menhut No. 327 tahun 2009.

Dalam surat pengaduan tersebut perwakilan petani berkas-berkas antara lain:

1. SK No. 327/Menhut-II/2009
2. Rekomendasi Wakil Bupati Bengkalis tahun 2005 tentang penambahan/perluasan areal kerja IUPHHK-HT atas nama PT. RAPP di Pulau Padang.
3. Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 326/VII/2006 tentang kelayakan lingkungan kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman di areal tambahan kabupaten Pelalawan, Siak dan Bengkalis Prop. Riau oleh PT. RAPP

4. Surat Pjs. Bupati Kepulauan Meranti tentang Peninjauan Ulang terhadap IUPHHK-HTI di Kepulauan Meranti No. 100/TAPEM/189 tahun 2009
5. Surat Bupati Kepulauan Meranti perihal Peninjauan Ulang terhadap IUPHHK-HTI PT. LUM, PT. SRL dan PT. RAPP No. 100/TAPEM/IX/2010/70
6. Surat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti perihal Tinjau Ulang izin operasional PT. SRL, PT. LUM dan PT. RAPP
7. Kronologis Perluasan Areal PT. RAPP oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau, Januari 2010, yang berisikan 12 item cacat administrasi dalam proses dikeluarkannya SK Menhut No. 327 tahun 2009 dan merekomendasikan untuk di tinjau ulang
8. Petisi atau tanda tangan penolakan masyarakat Pulau Padang terhadap PT. RAPP di Pulau Padang berbau menjadi satu baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD.

Berkas-berkas tersebut diterima langsung oleh Kuswanto dari Penerima laporan Pengaduan Masyarakat.

- **Kamis, tanggal 28 April 2011**

Hari yang ke empat para petani Pulau Padang sudah melakukan AKSI MOGOK MAKAN MASAL berangkat dari POSKO di depan Kantor Komnas HAM jam 06.00 pagi kembali mendatangi **KANTOR KEMENHUT DAN MENDIRIKAN TENDA** di depan pintu keluar masuk Kantor Menteri Kehutanan. Aksi Mogok Makan Massal semakin massif ketika para mahasiswa asal Riau yang berada di Jakarta yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Riau Jakarta (IPMRJ) ikut ambil bagian dan memberikan orasi-orasi tuntutan untuk mencabut SK No. 327 tahun 2009.

Para petani dengan kondisi yang sangat lemah karena sudah memasuki hari yang keempat MOGOK MAKAN sambil menanti kehadiran Bupati sebagaimana yang telah dijanjikan Menhut tidak kunjung tiba, maka sekitar jam 14.00 wib, karena para petani tidak diizinkan masuk untuk menemui Bupati dan Menteri, para petani memblokir jalan Raya di depan Kantor Kemenhut. Akibatnya jalan Gatot Subroto depan Kemenhut macet total. Pihak keamanan yang dari pagi hari mengawal aksi para petani pulau padang yang menuntut pencabutan SK Menhut No. 327 tahun 2009 kewalahan dan panik sehingga terjadi perdebatan antara pihak keamanan dan para petani. Akhirnya 7 orang perwakilan Petani Pulau padang diperkenankan untuk masuk dan menemui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Pertemuan para petani dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang didampingi oleh Hadi Daryanto (Setjen Kemenhut) Iman Santoso (Dirjen), Bedjo Santoso (Direktur Bina Kehutanan) dan beberapa pejabat lain dilingkungan Kementerian Kehutanan, tidak seindah bayangan dan harapan, malah justru para petani diprovokasi dan ditantang oleh Menhut. **Pertama**, Menhut menyangsikan bahkan tidak percaya bahwa para petani yang sudah sehari-hari melakukan aksi penolakan Operasional PT. RAPP di Pulau Padang di Jakarta dan menuntut Pencabutan SK Menhut No. 327 tahun 2009 bukan asli warga Pulau Padang, **kedua**, Menhut menyatakan bahwa "**pulau Padang tidak berpenghuni**", dan **ketiga**, mengancam dengan pernyataannya "**saudara-saudara mau demo silakan, satu hari, dua hari, tiga hari, sebulan, setahun silakan, tapi jangan ganggu kami, kalau ganggu kami saya lawan**".

- **Tanggal 11 Mei 2011,**

7 (tujuh) orang Perwakilan Petani Pulau Padang mendatangi Mabes Polri di Jakarta guna untuk mengadukan pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (tanggal 28 April 2011, sekitar jam 16.00 WIB ketika menemui masyarakat Pulau Padang) yang menyatakan bahwa "*Pulau Padang tidak berpenghuni berdasarkan laporan Bupati Kepulauan Meranti*". Pernyataan yang dinilai provokatif, dan meresahkan warga pulau padang.

- **Senin 30 Mei 2011**

900 orang lebih warga pulau padang dari berbagai desa melakukan aksi PENGHENTIAN OPERASIONAL PT. RAPP "secara paksa" di lokasi operasional Desa Tg. Padang tepatnya di Sungai Hiu, tepat di jalan koridor.

Masyarakat yang sudah cukup marah, di karenakan Surat Komnas HAM yang di alamatkan Ke Menhut maupun ke Pihak Perusahaan prihal penghentian Operasional tidak di indahkan baik oleh Menhut maupun pihak perusahaan. Berduyun-duyun menuju lokasi jalan koredor di Sg Hiu dengan lengkap membawa alat-alat petani sebagaimana pekerjaan sehari-hari. Tekad masyarakat sudah bulat yakni berperang di lokasi jika memang pihak perusahaan memaksakan kehendak terus melanjutkan membabat hutan alam ataupun lahan warga. Nyaris peperangan terbuka pun tak terhindarkan, namun kecakapan korlap aksi dalam situasi yang cukup mengerikan itu akhirnya dapat dikendalikan. Seluruh alat petani dalam bentuk benda tajam mampu di kumpulkan dalam sebuah rumah di pelabuhan Tg. Padang dalam jumlah sesuai jumlah aksi massa.

Perdebatan yang dilakukan oleh perwakilan massa aksi dengan pihak perusahaan berjalan cukup sengit dengan di mediasi oleh pihak kepolisian.

Hingga akhirnya massa membubarkan diri dan pulang setelah memblokir jalan dengan beberapa pohon kelapa besar di tengah jalan koredor dengan menancapkan bendera STR, LPTR dan Merah putih serta memasang sepanduk ukuran besar surat KOMNAS HAM, yang berisi desakan kepada Menhut dan PT. RAPP untuk menghentikan operasional.

- **30 MEI 2011 (23.00 WIB.)**

**Setelah Massa Aksi Pulang Di Kampung halaman masing-masing, menggunakan 6 kapal pompong,** diketahui dari berbagai media local bahwa di areal Jalan Koredor PT. RAPP Sg. Hiu Desa Tg. Padang, terjadi pembakaran 2 alat berat dan 2 Camp PT. RAPP. Akibat peristiwa tersebut warga Desa Tanjung Padang diburu pihak aparat meskipun tanpa bukti dan alasan yang jelas.

**Beberapa orang warga desa Tg. Padang di tangkap, diantaranya adalah** pak Zainal (warga dusun tanjung padang) rumahnya dikepung pada pagi hari oleh lebih kurang 14 aparat kepolisian bersenjata lengkap dan kemudian dibawa ke Mapolresta Bengkalis untuk dimintai keterangan. Namun kemudian dilepaskan.

**Hingga** detik ini (tgl 7 Januari 2012) masih ada 24 nama warga Desa Tanjung Padang , yang terus di buru oleh pihak aparat kepolisian tanpa alasan yang jelas, kebanyakan mereka tidak berani pulang ke desa sampai saat ini.

- **Kamis, 9 Juni 2011**

**PENCULIKAN 3(tiga)ORANG WARGA DESA LUKIT**

Pagi dini hari, sekitar jam 04.00 wib, pasukan keamanan menggunakan 1 kapal Dinas dari Polres Bengkalis mendatangi beberapa warga desa Lukit dan menculik 3 orang. Solehan (34 tahun) Dalail (54 tahun) dan Yahya (45 tahun). Ketiga orang tersebut diperlakukan seperti teroris, dengan memborgol kedua tangan dan menutup kepala dengan sebo sambil di pukuli kepalanya dalam kondisi muka tertutup.

Solehan dan dalail sempat dibawa kedalam kapal aparat yang sudah standby di pelabuhan desa Lukit.

Menyusul kemudian pak Yahya di kroyok oleh lebih kurang 10 orang aparat. Sempat terjadi adu jotos antara aparat dan pak yahya. Karena pak yahya tidak bersedia di bawa ke Polres bengkalis dengan alasan pihak kepolisian tidak membawa surat perintah dan surat penahanan atas nama Yahya.

Sebelum pak Yahya sempat dimasukkan kedalam kapal, setiba mobil yang membawa pak Yahya di Pelabuhan, masyarakat yang tidak terima atas penangkapan terhadap Solehan, Dalail, dan Yahya, Ratusan warga desa Lukit sudah memblokir pelabuhan dan menghadang mobil **PT Kondur** yang digunakan aparat kepolisian untuk membawa pak Yahya.

Beberapa tembakan peringatan dilepaskan aparat, untuk menakuti warga, namun warga tidak peduli. Akhirnya warga pun menahan pihak aparat. Meskipun aparat berulang kali menodongkan pistol ke dada beberapa warga, dan sempat juga aparat melepaskan tembakan ke Paha Sumarno yang memang menghalangi aparat yang akan masuk kedalam kapal.

Akhirnya negosiasi barter pun terjadi. Warga bersedia untuk melepaskan pihak aparat dengan syarat pak Solehan dan pak Dalail juga dilepaskan dan dikeluarkan dari kapal.

Setelah dilepaskan, Mendengar Laporan bahwa pak dalail dan pak Solehan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh aparat, warga pun marah dan menuntut kasus pemukulan yang dilakukan oleh aparat untuk diselesaikan di Kantor Desa. Pihak aparat menolak, seketika itulah rentetan tembakan senjata otomatis tak terhitung jumlahnya pada sekitar jam 06.00 wib.

Desakan warga membuat salah satu aparat menjatuhkan diri ke laut karena di desak warga (di pelabuhan Jati PT Kondur) untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Sambil salah seorang yang berada dikapal menyelamatkan salah seorang aparat yang menjatuhkan diri ke laut, pihak aparat juga melepaskan tembakan senapan otomatis yang terhitung jumlahnya, terkadang diarahkan ke warga dan kadang ke atas sambil menenggalkan pelabuhan.

- **Tanggal 29 Agustus 2011**

Warga Pulau Padang di tengah terik Matahari pada bulan puasa, yakni 2 hari menjelang hari Raya Idul Fitri berbondong-bondong mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti, untuk yang kesekian kalinya tanpa henti menuntut Pemerintah Daerah dan Pusat untuk mengabulkan tuntutan cabut SK No. 327 Menhut-II/2009, meskipun penuh dengan pelecehan oleh Satpol PP, pandangan sinis dan lain sebagainya.

- **Minggu, 30 Oktober 2011**

79 orang warga Pulau Padang berangkat dari pelabuhan desa lukit dengan menggunakan 2 kapal Pompong, dan menuju ke Pekan baru menggunakan 1 bus 4 buah travel. Dan kemudian mendirikan Posko di Kantor DPRD Prop. Riau.

- **Senin, 31 Oktober 2011**

79 warga Pulau Padang melakukan Hearing dengan Komisi A DPRD Prop. Riau. Menyampaikan tuntutan Kepada DPRD Prop. Khususnya Komisi A untuk merekomendasikan Tinjau Ulang SK. No. 327/ Menhut-II/2009.

Komisi A Bagus Santoso, berjanji akan menyampaikan aspirasi warga Pulau Padang tersebut kepada Ketua DPRD Prop. Riau

Karena jawaban Komisi A, mengambang dan tidak ada ketegasan warga Pulau Padang mengancam akan melakukan AKSI JAHIT MULUT. Bagus santoso yang juga ketua Komisi A menyampaikan bahwa beliau tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut. Wewenang tersebut terletak pada ketua DPRD.

- **Selasa Tanggal 1 November 2011**

5 orang dari 79 orang melakukan aksi **JAHIT MULUT** di Masjid Komplek DPRD Prop. Riau, meraka adalah M. Riduan, Sulatra, Sapridin, Khusaini dan Soim. AKSI JAHIT MULUT INI DI LAKUKAN Untuk mendesak para pengambil kebijakan DI SEMUA TINGKATAN, supaya memperhatikan dan mendengar **MEMPERTIMBANGKAN** aspirasi yang sudah bertahun-tahun DI SUARAKAN.

- **Rabu, 2 November 2011**

Beberapa perwakilan dari 9 desa di pulau Padang hearing dengan Komisi B dan diterima langsung oleh ketua Komisi B T. Azwir. Lagi-lagi jawaban untuk rekomendasi Pencabutan/tinjau ulang SK No. 327 tahun 2009 tidak sesuai dengan harapan.

- **Kamis 3 November 2011**

3 orang perwakilan warga Pulau Padang menemui ketua DPRD Prop. Riau Johar Firdaus di Ruang Kerjanya, terkait dengan tuntutan warga Pulau Padang, jawaban juga masih sama dan bahkan lebih menyakitkan, dengan mengatakan "laporan dari Komisi A belum saya baca dan secara teknis itu wewenang Komisi A. dan permasalahan ini sepenuhnya saya serahkan kepada Komisi A.

- **Jumat 4 November 2011**

EMPAT (4) dari lima (5) orang peserta AKSI JAHIT MULUT BERSAMA 70an warga Pulau Padang melakukan Aksi Ke Kantor GUBERNUR RIAU, agar Gubernur Riau bertanggung jawab terhadap Operasioanal PT RAPP di Pulau Padang, karena operasional PT RAPP di Pulau Padang berdasarkan Surat Izin Koredor yang di keluarkan Oleh Gubernur Riau. Warga menuntut agar Gubernur Riau Mencabut Rekomendasi yang pernah di keluarkan untuk izin operasional PT. RAPP di Pulau Padang.

Suasana Aksi sempat gempar, wartawan, aparat kepolisian, satpol PP menengis dan menitikkan air mata karena tidak sampai hati dan haru barangkali melihat salah seorang

dari Peserta Aksi JAHIT MULUT sempat kejang-kejang dan pingsan ditengah terik panasnya matahari tepat jam 11.00 siang, didepan PINTU GERBANG Kantor Gubernur, karena sudah 4 hari tidak mengkonsumsi makanan dalam kondisi mulut di Jahit.

Jam 11.30 wib. Massa AKSI mendatangi Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, menyiarkan secara langsung penolakan terhadap operasioanal PT RAPP di Pulau Padang, dan menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia pada semua tingkatan untuk, untuk mengabulkan tuntutan warga pulau Padang yakni Cabut SK No. 327/Menhut-II/2009 Blok Pulau Padang seluas 41.205 ha.

Jam 14.00 wib beberapa perwakilan warga Pulau Padang dialog dengan Pejabat Pemprov Riau di Kantor Gubernur, terkait dengan kinerja TIM TERPADU "PALSU" Pemda Meranti. Hasil dialog adalah Pemprov dan Tim Terpadu berjanji akan turun kelapangan, yang hasilnya jika ternyata ada tumpang tindih lahan, akan segera mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin operasioanal PT. RAPP di blok Pulau Padang. Namun kenyataannya kemudian setelah TIM turun ke lokasi areal konsesi dan di dapati adanya banyak lahan warga yang tertindih dan di rampas pihak perusahaan, Gubernur Riau tidak juga mengeluarkan Rekomendasi Pencabutan SK. NO. 327 Menhut Tahun 2009 blok Pulau Padang.

- **Kamis 17 November 2011**

Berdasarkan undangan DPD RI dapil Riau, tertanggal 3 November 2011, Di gedung DPRD Prop. Riau yang di Fasilitasi Anggota DPD RI dapil Riau, Drs. H. M. Gafar Usman, MSc, Intsiawati Ayus, SH,MH, Dra. Hj.Maimanah Umar, MA, Muhammad Gazali, Lc, diadakan dialog multi pihak dalam rangka menyelesaikan kasus Pulau Padang dan tuntutan warga. Pertemuan yang di hadiri oleh berbagai pihak, an. Bupati kep. Meranti dan seluruh pejabat Pemda Meranti, ketua DPRD Prop Riau,Kepala Dinas Kehutanan Prop. Riau, DPD RI dapil Riau Masyarakat Pulau Padang dll. Namun lagi-lagi hasilnya sangat-sangat mengecewakan warga Pulau Padang.

- **Selasa, 13 Desember 2011**

Jam 15.00 wib, Di Masjid Raya Desa Bagan Melibur berkumpul 400an orang dari berbagai desa dari Pulau Padang, dalam rangka melepaskan 82 orang PESERTA AKSI JAHIT MULUT ke Jakarta. Pelepasan di pimpin oleh kades SAMAUN, S.Sos, alim ulama tokoh masyarakat dan tokoh agama.

- **Jumat, 16 Desember 2011**

Warga Pulau Padang sampai di JAKARTA

Sampai di Jakarta langsung aksi ke Gedung Manggala Wanabakti Kemenhut, jl. Gatot Subroto, menghasilkan:

Poin 6: Tuntutan masyarakat Pulau Padang akan ditindak lanjuti sebagai berikut

- a. Akan dibuat surat kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk menerbitkan rekomendasi pencabutan HTI atas nama PT. RAPP
- b. Akan dibuat surat kepada kepala dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk tidak menerbitkan RKT atas nama perusahaan PT RAPP

**HINGGA SAAT INI MASIH BERTENDA DI DEPAN GEDUNG DPR RI JAKARTA (DARI 16 DESEMBER 2011—MINGGU 8 JANUARI 2012)**

- **Selasa, 20 Desember 2011**  
**Di depan Gedung DPR RI di Jakarta,**  
 8 orang warga pulau padang melakukan AKSI JAHIT MULUT, tanpa TIM MEDIS, dengan menusukkan jarum secara sendiri-sendiri.
- **Rabu, 21 Desember 2011**  
 Penambahan 10 Peserta AKSI JAHIT MULUT warga Pulau Padang, yang dibantu oleh TIM MEDIS, karena tidak adanya respon dari pemerintah
- **Kamis, 22 Desember 2011**  
 Penambahan Peserta AKSI JAHIT MULUT 10 rang warga Pulau Padang
- **Selasa 27 Desember 2011**  
 Pagi mulai jam 06.00 wib, Warga Pulau Padang dari berbagai desa sekitar 5000an orang laki, perempuan, anak-anak dengan menggunakan 16 buah kapal kapasitas 400an orang sampai kapasitas 100an orang dan 300an sepeda motor, menuju selatpanjang, menduduki Kantor Bupati Kepulauan Meranti dengan segala perlengkapan memasak, beras, kuwali, panci, tenda, dll. Massa menolak berdialog, namun massa secara resmi **menyerahkan PERNYATAAN SIKAP** tuntutan MASYARAKAT kepada Bupati Kepulauan Meranti yang di terima langsung oleh Asisten I H. Nuriman Kep. Meranti, dan beberapa pejabat Pemda yang isinya: meminta Bupati untuk mengeluarkan rekomendasi Pencabutan SK. 327/menhut/2009 (Revisi SK No. 327/2009- yakni mengeluarkan hamparan Pulau Padang seluas 41.205 ha keluar dari SK tersebut)  
 Aksi pendudukan kantor Bupati Kepulauan Meranti oleh warga Pulau Padang berlangsung hingga 5 hari-4 malam,
- **Rabu, 28 desember 2011**  
 Massa aksi warga Pulau Padang yang menginap di kantor Bupati tersebut, mendatangi DPRD Kep. Meranti menuntut sikap tegas DPRD Kep. Meranti terhadap penolakan Terhadap Operasional PT. RAPP di Pulau Padang.
- **Kamis, 29 Desember 2011**  
**Massa masih bertahan di depan Kantor Bupati**  
 Mendengar pernyataan Bupati Kep. Meranti Via Telp dari **SINGGAPOR** Kepada Korlap Aksi Sumarjan: menanyakan "berapa massa aksi?" dijawab korlap "mendekati lima ribu orang (5000) orang pak", bupati menjawab "**apa tidak Cuma lima ratus (500) orang**" Masyarakat di kampung mendengar ejekan Bupati di atas, tidak lengah, malam jumat meluncur lagi masyarakat Pulau Padang dengan menggunakan 4 buah kapal, (Kamis Malam Jumat)
- **Kamis malam Jumat 29 Desember 2011**  
**ISTIGHOTSAH AKBAR DI DEPAN KANTOR BUPATI**

Warga PULAU Padang yang memang mayoritas adalah warga Nahdliyyin (NU) menggelar Shlat Isya' berjamaah di Jalan RAYA, sholat Hajat, ISTIGHOTSAH AKBAR dan wirid yasin, yang di pimpin oleh Tokoh-tokoh agama dari berbagai Desa; memohon Kepada ALLAH SWT agar tuntutan warga pulau padang diberikan pertolongan oleh ALLAH SWT.

- **Jumat, 30 Desember 2011**

**MASYARAKAT** Pulau padang yang masih berada di kampung meluncur ke kantor Bupati bergabung dengan 5000an massa yang sudah 3 hari menginap di Depan Kantor Bupati, sebanyak 500an sepeda motor berboncengan.

Masyarakat menolak uang pemberian Bupati, satu ikat ikat uang pecahan Rp. 100.000, (kira-kira 10.000.000,-)ditolak massa, mereka berteriak **"yang kami butuhkan Rekomendasi Pencabutan/Revisi SK. No. 327 Menhut 2009 BUKAN UANG"**

Perwakilan massa 10 rang dialog dengan Bupati didalam kantor menghasilkan: **Bupati Kepulauan Meranti bersama 3 orang perwakilan Tokoh Masyarakat untuk menemui menteri kehutanan prihal revisi SK. No. 327 menhut tahun 2009**

- **Jumat 30 Desember 2011 (Di Jakarta)**

Warga pulau Padang mendatangi Kantor Menteri kehutanan, menolak dan mendesak kemenhut:

1. Meminta kementrian kehutanan segera merealisasikan hasil kesepakatan tanggal 16 dan 27 Desember 2011
2. Moratorium dengan menghentikan opsional PT RAPP di pulau Padang secepatnya
3. Menolak TIM Mediasi yang di bentuk kemenhut.
4. Mengundang Menteri Kehutanan untuk bersama-sama masyarakat Pulau Padang untuk ke lokasi.

Notulensi di tandatangani oleh **Kemenhut Sugeng Marsudiarto** dan perwakilan masyarakat Pulau Padang.

- **Rabu 4 Januari 2012**

**BUPATI DISIRAM AIR dan DI USIR dari PULAU PADANG**

Bupati KEPULAUAN MERANTI, RIAU di kroyok RIBUAN massa dan di SIRAM AIR hingga 2 kali oleh seorang ibu yang di ajak bersalaman tidak lama turun dari mobil SERTA di USIR dari pulau PADANG.

Ribauan Massa menyerbu Kantor CAMAT MERBAU, setelah mendengar Bupati yang agendanya adalah ke JAKARTA untuk pertemuan dengan Menhut dan warga Pulau Padang, malah dating ke Pulau Padang. (Sumber: Rajiono warga desa lukit/saksi mata)

- **Kamis, 5 Januari 2012**

Warga pualau padang 90an orang, yang berada di Jakarta mendatangi Kemenhut untuk pertemuan denga Bupati dan Menteri Kehutanan. Namun pertemuan hanya dilakukan dengan Kemenhut dan 20 orang perwakilan masy. Pulau Padang yang juga di sertai oleh Anggota DPD RI asal Riau **INSTIAWATI AYUS**, menghasilkan;

1. Agenda hari Jumat tgl 6 Januari 2012 untuk pertemuan dengan Bupati Kep. Meranti dan Menteri Kehutanan dari masyarakat sejumlah orang yang sama pada pertemuan saat ini (tgl 5 Januari 2012)
2. Kemenhut siap untuk mengeluarkan surat Pencabutan/revisi SK. No. 327 Menhut/2009 dengan **MENGELUARKAN HAMPARAN PULAU PADANG** dari SK. No. 327 Menhut tahun 2009 seluas 41.205 ha jika Bupati Kepulauan Meranti merekomendasikan pencabutan/revisi SK. Menhut tersebut.

- **Jumat, 6 Desember 2012**

Jam 13.00 wib, Massa warga Pulau padang mendatangi Kemenhut, sampai di pintu masuk GEDUNG GRAHA WANA BAKTI, Kemenhut hanya meminta perwakilan tiga (3) orang sebagaimana permintaan bupati dengan Mengatakan "**tiga orang perwakilan masyarakat pulau padang saya tunggu lima (5) menit, jika tidak mau say akan pulang.....!**"

Masyarakat Pulau Padang yang sudah hamper satu bulan bertenda di Depan **Gedung DPR RI, MENDENGAR** penyampaian Pihak Kemenhut pun kemudian massa Warga Pulau Padang bersikukuh, justru seharusnya yang bisa masuk menjadi 23 orang, tapi kenapa hanya di izinkan Tiga (3) orang, sebagaimana di sampaikan oleh pihak Kemenhut.

**Jam 14.30 wib** ibu **Instiawati Ayus anggota DPD RI** menghampiri warga masyarakat Pulau Padang, setelah menyampaikan banayak hal kepada Media Massa/wartawan, kemudian mengajak empat (4) orang perwakilan untuk menemui Ketua DPD RI H. Irman Gusman, dan Sekjen DPD RI Siti Nurbaya (Mantan Setjen Kemendagri) di lantai 7 gedung DPR RI.

**Perwakilan masyarakat Pulau Padang menyampaikn** semua aspirasi dan lika-liku perjuangan Masyarakat Pulau Padang menolak kehadiran PT RAPP di Pulau Padang, sejak dikeluarkannya SK. No. 327 Menhut tahun 2009, (sebagaimana dalam kronologis Penolakan ini)

H. Irman Gusman Ketua DPD RI berjanji akan menyelesaikan permasalahan penolakan warga Pulau Padang. Beliau mengatakan "**percayaikan pada kami persoalan bapak-bapak, kami juga sama seperti bapak-bapak, kita sama-sama berjuang**", bahkan ketika salah satu perwakilan menyampaikan tentang data-data kepalsuan PT RAPP dan akan menunjukkan kepada beliau, beliau mengatakan "**udah, udah kami percaya apa yang semua bapak-bapak sampaikan**". Masyarakat menyampaikan bahwa peta satelit tahun 2002 yang di publikasikan oleh PT RAPP adalah **PEMBOHONGAN** yakni dengan menonjolkan tingkat degradasi hutan dan tingkat deforestasi dan penurunan emisi yang tinggi di pulau padang adalah tidak benar. Hamper Semua data yang tercantum dalam AMDAL PT RAPP tidak benar karena ketebalan gambut pulau padang hanya berkisar 1-2 M.

Perwakilan masyarakat memiliki data dan dokumen pembanding hasil penelitian/pegeboran april 2011 (**Oka Karyanto dkk**), dan data ketebalan gambut di pulau padang yang mencapai 12 meter (**Brady 1997**) yang secara ilmiah bahwa Pulau Padang dengan segala karakteristik dan kelebihanannya tidak layak untuk di HTI kan.

- **Minggu 8 Januari 2012**

Warga Pulau Padang Masih tetap bertahan dan bertenda di depan gedung DPR RI, kehujanan, kepanasan, makan apa adanya dan tidak akan pulang sebelum SK. No. 327 Menhut tahun 2009 di revisi dengan mengeluarkan Hamparan Pulau Padang di kkeluarkan dari SK. Tersebut.

Jakarta, 8 Januari 2012